

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya atas dasar prinsip koperasi dan kaidah ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitarnya, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi memiliki karakteristik utama yang membedakannya dengan badan usaha lain yaitu adanya identitas ganda pada anggotanya. Anggota koperasi berperan sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Berkembangnya kegiatan usaha koperasi, tuntutan agar pengelolaan koperasi dilaksanakan secara profesional akan semakin besar. Pengelolaan yang profesional memerlukan adanya sistem pertanggungjawaban yang baik dan informasi yang relevan serta dapat diandalkan, untuk pengambilan keputusan perencanaan dan pengendalian koperasi. Salah satu upaya tersebut adalah pengembangan dari sistem informasi yang diperlukan untuk menumbuhkan koperasi melalui akuntansi, khususnya merumuskan standar akuntansi keuangan untuk koperasi dalam penyusunan laporan keuangannya (Nurdita, 2012).

Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan. Laporan

keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan PSAK, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi serta berstandar. Sebaliknya jika laporan keuangan koperasi disusun tidak berdasarkan standar dan prinsip yang berlaku, dapat menyesatkan penggunaanya (Putro, 2013).

Di Indonesia sendiri telah dibuat standar akuntansi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan pelaku koperasi, yaitu SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik). SAK ETAP tersebut telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditunjukkan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

SAK ETAP berlaku juga bagi koperasi yang notabene entitas kecil yang semula menggunakan Standar Akuntansi Koperasi menjadi SAK ETAP (Sumber : Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04 / per / m.kukm / vii / 2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi) :

“Laporan keuangan koperasi menyajikan beberapa informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Pedoman ini adalah merupakan penyempurnaan atas Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia sebelumnya, yang berisi praktek penerapan akuntansi pada entitas koperasi dengan memperhatikan perubahan pada perkembangan Standar Akuntansi Keuangan yang mengacu pada laporan keuangan internasional (International Financial Reporting Standard / IFRS).

Kehadiran SAK ETAP diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk koperasi dalam menyajikan laporan keuangan dan menjadi solusi permasalahan internal perusahaan, terutama bagi manajemen yang hanya melihat hasil laba yang diperoleh tanpa melihat kondisi keuangan yang sebenarnya (Auliyah dalam Azaria, 2013). Tujuan SAK ETAP sendiri yakni memberikan kemudahan bagi entitas seperti koperasi. SAK yang berbasis IFRS (SAK umum) ditunjukkan bagi entitas yang mempunyai tanggung jawab publik signifikan dan entitas yang banyak melakukan kegiatan lintas negara. Sehingga, rumit untuk dipahami serta diterapkan bagi sebagian besar entitas koperasi. Beberapa hal SAK ETAP memberikan banyak kemudahan untuk suatu entitas dibandingkan dengan SAK Umum dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam menilai kesehatan perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan

adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupun eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah. SAK ETAP sendiri dibuat untuk mengatasi segala keluhan penerapan PSAK umum pada entitas tanpa akuntabilitas publik. SAK ETAP bertujuan untuk mengakomodir segala kebutuhan entitas tanpa akuntabilitas publik dalam pelaporan keuangan. Berdasarkan hal tersebut maka sudah seharusnya entitas tanpa akuntabilitas publik menerapkan SAK-ETAP dalam menyajikan laporan keuangannya. Dengan adanya perubahan dalam hal peraturan dalam menyusun laporan keuangan di tingkat negara, maka penyusunan laporan keuangan pada koperasi tersebut diharapkan telah menyesuaikan dengan peraturan yang ada sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di antara koperasi terutama daya bandingnya.

Viona (2016), meneliti tentang Analisis Implementasi Standar Akuntansi Keuanganmentitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Koperasi (Studi Kasus pada Koperasi di Bandarlampung). Menurut

viona, laporan keuangan SAK ETAP Masih terdapat kesalahan dalam penempatan akun pada laporan keuangan koperasi serta adanya ketidakseimbangan total pasiva dan total aktiva pada salah satu sampel.

Penelitian dengan topik yang sama juga dilakukan oleh Raven (2016), meneliti tentang Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP Pada Koperasi Karyawan Bank Sulut Go Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP.

Dari penelitian terdahulu, rata – rata sudah menerapkan SAK ETAP sebagai standarnya namun masih ada kesalahan dan ketidaksesuaian dengan kaidah penyajian laporan keuangan.

Koperasi Karyawan Polres Situbondo sudah menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya karena dengan laporan keuangan yang berdasarkan standar, serta dapat menyajikan informasi yang andal dan relevan. Namun penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan di Koperasi belum sepenuhnya diterapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi laporan keuangan berdasarkan SAK-ETAP pada koperasi karyawan polres situbondo dimana koperasi ini belum sepenuhnya melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Penelitian ini mengambil studi kasus pada koperasi yang beroperasi di

daerah Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul skripsi: **“Implementasi SAK-ETAP untuk Penyusunan Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan Polres Situbondo (Studi Kasus pada Koperasi Karyawan Polres di Situbondo)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut pokok permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaporan keuangan di koperasi karyawan Polres Situbondo?
2. Bagaimana Implementasi Pelaporan Keuangan berdasarkan SAK-ETAP di Koperasi Karyawan Polres Situbondo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mendeskripsikan pelaporan keuangan di koperasi karyawan Polres Situbondo.
2. Untuk Menganalisis dan mengevaluasi Implementasi Laporan Keuangan berdasarkan SAK-ETAP di Koperasi Karyawan Polres Situbondo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi Mahasiswa, Perusahaan atau koperasi.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai implementasi Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi atau acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pemahaman terhadap Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan selain bahan masukan dan pertimbangan bagi koperasi dalam membuat laporan keuangan koperasi.